

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Sederhana Wanprestasi dalam sengketa perkara Ekonomi Syariah yang diajukan oleh:

Christel Lasmana, Direktur PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suhan Jagara** dan **Adek Gupal Putra**, Keduanya Karyawan PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan di Sijunjung beralamat di Jl. Imam Bonjol Jorong Pasar Ilie Pasar Jumat Nagari Muaro Sijunjung, Sumatera Barat No. Telepon: 0754-2093, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2022, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 5/K.Kh/2022/PA.SJJ, tanggal 05 April 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Riko bin Rusli, tempat dan tanggal lahir: Pesisir Selatan, 06 Juli 1979, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan -, Tempat kediaman di Jor. Ladang Kapeh Kel. Padang Sibusuk, Kec. Kupitan, Kab. Sijunjung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 09 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SJJ, pada tanggal 05 April 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan: Ingkar janji/Wanprestasi;
2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)? Akad Murabahah No. 542021040014M yang dibuat pada hari Selasa, 13 April 2021;
3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut? Perjanjian/Akad Tertulis;
4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?
 - Yang diperjanjikan dalam Akad Murabahah adalah:
 - a. Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, type BEAT SPORTY CBS, No.Rangka MH1JM811MK448880 No.Mesin JM81E1453157 dan No. Polisi BA 4130 KL; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 16.110.000,- (Enam Belas Juta Seratus Sepuluh ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 35 (Tiga Puluh Lima) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp. 749.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 07 (Tujuh) setiap bulannya sampai dengan lunas;
 - b. Selama Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya, maka:
 - 1) Kendaraan akan tetap dipakai oleh Tergugat sendiri sedangkan dokumen kepemilikan kendaraan termasuk BPKB dikuasai oleh Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya;
 - 2) Tergugat dilarang untuk menyewakan, meminjamkan, mengagunkan atau memindahtangankan, menggadaikan, mengalihkan dengan cara bagaimanapun kendaraan tersebut kepada orang atau Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari

Penggugat (Pasal 5 Akad);

- 3) Apabila Tergugat tidak membayar angsuran sesuai ketentuan Akad, maka Penggugat berhak melakukan penarikan Kendaraan tersebut dari pihak manapun yang menguasai kendaraan dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak diambil alih atau ditarik, Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menjual kendaraan dan diperhitungkan dengan sisa kewajiban Tergugat (Pasal 8 Akad);

5. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Akad Murabahah di mana sejak tanggal 07 Desember 2021, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu:

- a. Surat Peringatan Pertama tertanggal 07 Januari 2022 No. SPKNS54202022010700210-1;
- b. Surat Peringatan Kedua tertanggal 10 Januari 2022 No. SPKNS54202022011000312-2;
- c. Surat Peringatan Ketiga tertanggal 15 Januari 2022 No.SPKNS54202022011500114-3;

6. Berapa kerugian yang anda derita?

Rp. 24.726.055,- (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh enam Ribu Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri dari:

RINCIAN KERUGIAN		
1)	Sisa harga perolehan yang menjadi hutang pokok	Rp. 14.787.068
2)	Sisa Margin keuntungan	Rp. 6.184.932
3)	Denda (Ta'jir)	Rp. 805.175
4)	Biaya transportasi Sidang Gugatan ini 4 x Rp. 150.000	Rp. 150 .000
5)	Biaya Legalisasi Bukti (Sertifikat Fidusia)	Rp. 350.000
6)	Biaya Administrasi	Rp. 1.208.880

7)	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 1.240.000
----	---------------------------	---------------

7. Uraian lainnya:

PERMOHONAN SITA JAMINAN

- a. Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk melakukan pembiayaan atas Kendaraan dan karenanya Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Akad Murabahah di mana dalam Akad tersebut Tergugat juga sudah setuju untuk mengembalikan pembiayaan berikut Margin Keuntungan dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap bulannya;
- b. Bahwa sebagai bukti pembiayaan atas Kendaraan tersebut, maka BPKB Kendaraan tersebut yang masih tertera atas nama Tergugat masih berada dalam penguasaan Penggugat dan atas jaminan tersebut juga sudah ada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00089525.AH.05.01 TAHUN 2021. Adapun spesifikasi Kendaraan yang dimohonkan sita tersebut adalah: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM811XMK448880, No. Mesin JM81E1453157, No. Polisi BA 4130 KL, BPKB atas nama Riko;
- c. Bahwa untuk maksud Sita tersebut, maka apabila Hakim mengabulkannya, Kendaraan dapat dititipkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan Kendaraan tersebut;
- d. Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat dan orang yang ditunjuknya, padahal Tergugat sudah tidak pernah lagi mau membayar kewajibannya kepada Penggugat dan sudah ada juga Sertifikat Fidusianya, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian tersebut oleh

Tergugat dan karena adanya persangkaan Penggugat yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan Kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap Kendaraan tersebut dapat diletakkan sita jaminan;

- e. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan: *“Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.”*

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Akad Murabahah No. 542021040014M, tanggal 13 April 2021.

Keterangan Bukti ini membuktikan bahwa benar Tergugat telah singkat: menandatangani Akad Murabahah. Dalam Akad tersebut antara lain diatur bahwa Penggugat yang melakukan pembiayaan Kendaraan, di mana Kendaraan akan dipakai Tergugat sedangkan Bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) akan tetap berada di Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya.

2. BPKB Nomor Q07766704 atas nama Riko (Tergugat) yang saat ini aslinya ada pada Penggugat.

Keterangan Bukti ini membuktikan bahwa benar Kendaraan sebagai singkat: jaminan atas pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga sampai saat ini asli BPKB Kendaraan masih berada di Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.

3. Surat Somasi/Peringatan

- a. Surat Peringatan Pertama No.
tertanggal 07 Januari 2022 SPKNS54202022010700210-1
- b. Surat Peringatan Kedua tertanggal No.
10 Januari 2022 SPKNS54202022011000312-2
- c. Surat Peringatan Ketiga tertanggal No.
15 Januari 2022 SPKNS54202022011500114-3

Keterangan Bukti ini membuktikan bahwa benar sebelum melakukan
singkat: Gugatan Sederhana ini, Penggugat telah melakukan
peringatan dengan mengirimkan surat peringatan/somasi
sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Tergugat untuk
melaksanakan kewajibannya, namun Tergugat sama sekali
tidak mengindahkannya.

4. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00089525.AH.05.01 TAHUN 2021

Keterangan Bukti ini membuktikan bahwa secara hukum Kendaraan
singkat: sudah dialihkan kepemilikannya kepada Penggugat
sekaligus telah memberikan kekuatan hak eksekutorial
langsung (parate eksekusi) apabila Tergugat melakukan
pelanggaran dalam perjanjian.

Saksi:

Ropi (Kolektor PT. Mandala Multifinance, Tbk Cabang Sijunjung)

Keterangan Benar saksi sebagai karyawan Penggugat yang melakukan
singkat : penagihan angsuran kepada Tergugat .

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas,
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung, untuk
memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah
ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan
selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Dalam Permohonan SITA:
 - a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM811MK448880, No. Mesin JM81E1453157, No. Polisi BA 4130 KL, BPKB atas nama Riko;
 - b. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp.24,726,055,- (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Puluh Lima Rupiah);
5. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM811XMK448880, No. Mesin JM81E1453157, No. Polisi BA 4031 KL , BPKB atas nama Riko apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM811XMK448880, No. Mesin JM81E1453157, No. Polisi BA 4031 KL, BPKB atas nama Riko, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan;
7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM811XMK448880, No. Mesin JM81E1453157, No. Polisi BA 4031 KL, BPKB atas nama Riko, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan

kewajiban Tergugat;

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Penggugat dan Tegugat telah datang ke persidangan, kemudian Hakim menasehati Penggugat dan Tegugat agar menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan dimaksud, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui semua dalil yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat dan Tergugat juga tidak keberatan kendaraan tersebut disita maupun diambil oleh Tergugat, hanya saja saat ini kendaraan tersebut telah disita oleh Polres Solok karena anak Tergugat mengalami kecelakaan lalu lintas dan menenggol orang dan sudah diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan, namun sampai saat ini belum selesai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Riko (Tergugat), NIK 1303100607790002, dikeluarkan pada tanggal 30-09-2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, yang materinya

Tergugat adalah penduduk Kabupaten Sijunjung, yang telah dinazegellen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti **P-1**;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Ezi Eka Putri (Isteri Tergugat), NIK 1303105412800002, dikeluarkan pada tanggal 05-04-2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, yang materinya Ezi Eka Putri adalah penduduk Kabupaten Sijunjung, yang telah dinazegellen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Riko (Tergugat), Nomor 1303100801080073, dikeluarkan pada tanggal 19-09-2019, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, yang materinya Riko sebagai Kepala Keluarga dan Ezi Eka Putri sebagai isteri, yang telah dinazegellen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Akad Murabahah An. Suhan Jagara (Penggugat/Pimpinan Cabang) dan Riko (Tergugat/Konsumen), Nomor 542021040014M, dibuat pada tanggal 13-04-2021, yang materinya Penggugat telah melakukan pembiayaan kendaraan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM811MK448880, No. Mesin JM81E1453157, No. Polisi BA 4130 KL, BPKB atas nama Riko, dan Tergugat telah menerima kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tetap berada pada Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya, yang telah dinazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) An. Riko (Tergugat), Q-007766704, dikeluarkan pada tanggal 14-04-2021, oleh Polda Sumatera Barat, yang materinya 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM811MK448880, No. Mesin JM81E1453157, No. Polisi BA 4130 KL, BPKB atas nama Riko, yang telah

dinazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti **P-5**;

6. Fotokopi 3 (tiga) Surat Somasi/Peringatan yang dibuat oleh Penggugat dan ditujukan kepada Tergugat, yaitu:

a. Surat Peringatan Pertama tertanggal 07 Januari 2022, No. SPKNS54202022010700210-1;

b. Surat Peringatan Kedua tertanggal 10 Januari 2022, No. SPKNS54202022011000312-2;

c. Surat Peringatan Ketiga tertanggal 15 Januari 2022, No. SPKNS54202022011500114-3;

yang materinya Tergugat (Riko) sudah 3 (tiga) kali diberikan peringatan/somasi agar melunasi angsuran ke-08 sampai ke-9, namun Tergugat tidak melunasinya, yang telah dinazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti **P-6**;

Bahwa semua bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat menyatakan P.1, P.2 dan P.3 ada aslinya sama Tergugat, Tergugat juga mengakui adanya bukti P.4, P.5 dan P.6;

Bukti Keterangan Saksi:

1. **Ropi bin Muslir**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adalah karyawan PT. Mandala Multifinance, dengan jabatan sebagai kolektor (penagih);
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Riko, Tergugat adalah konsumen dalam akad murabahah jual beli kendaraan (motor) pada perusahaan PT.Mandala Multifinance, Tbk;
- Bahwa jenis kendaraan yang dibiayai oleh PT.Mandala Multifinance.Tbk untuk Tergugat adalah Honda Beat, namun saksi belum pernah melihat motor tersebut;
- Bahwa saksi bertugas mengantarkan surat peringatan kepada Tergugat karena angsuran hutang Tergugat macet;

- Bahwa saksi mengantarkan surat peringatan pertama kepada Tergugat tanggal 7 Januari 2022, Tergugat saat itu mengatakan sedang sulit keuangan, lalu 3 hari kemudian saksi mengantarkan surat peringatan kedua kepada Tergugat;
- Bahwa saat itu saksi tidak bertemu dengan Tergugat, saksi hanya bertemu dengan anak Tergugat dan saksi saat itu hanya menitipkan surat peringatan itu saja kepada anak Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah surat peringatan tersebut, Tergugat tetap tidak membayar kewajibannya;
- Bahwa tiga hari setelah peringatan kedua itu, saksi ditugaskan lagi mengantar surat peringatan ketiga ke tempat Tergugat, saat itu saksi hanya bertemu dengan anak Tergugat;
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat, saat ini kendaraan itu berada di Polres Solok karena anak Tergugat memakai kendaraan itu terlibat kecelakaan menyanggol orang lain dan sampai saat ini belum ada penyelesaiannya;
- Bahwa pada Maret 2022, ketika permasalahan akan dilanjutkan ke Pengadilan, isteri Tergugat meminta untuk ditunda dulu, tetapi tidak ada juga penyelesaian atau titik terangnya sampai saat ini;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti guna menguatkan dalil-dalilnya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang Ekonomi Syariah sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan berdasarkan bukti bertanda P.4 (Surat Perjanjian/Akad Murabahah Nomor 542021040014M, dibuat pada tanggal 13 April 2021) merupakan perjanjian/akad dengan menggunakan prinsip syariah dan tidak mencantumkan klausula arbitrase, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam sengketa Ekonomi Syariah dalam bentuk gugatan sederhana harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Tergugat (*vide* Pasal 142 ayat (1) R.Bg), antara Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan yang sama (*vide* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana), maka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2022 Christel Lasmana (Penggugat) selaku Direktur PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Jakarta telah memberikan kuasa kepada Suhan Jagara dan Adek Gupal Putra, Keduanya Karyawan PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan di Sijunjung beralamat di Jl. Imam Bonjol Jorong Pasar Ilie Pasar Jumat Nagari Muaro Sijunjung, Sumatera Barat, dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 saat ini Tergugat berdomisili di wilayah Kecamatan Kupitan, dimana Kecamatan Kupitan termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, dimana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, amanat Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 telah terpenuhi. Oleh karena itu, Hakim berpendapat upaya perdamaian tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun, dan ternyata surat gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 Rv. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perikatan berupa Akad Murabahah Nomor 542021040014M, dibuat pada tanggal 13 April 2021, dimana Penggugat telah melakukan pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM811MK448880, No. Mesin JM81E1453157, No. Polisi BA 4130 KL, BPKB atas nama Riko, dan Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp.16.110.000,- (Enam Belas Juta Seratus Sepuluh ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 35 (Tiga Puluh Lima) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp.749.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 07 (Tujuh) setiap bulannya sampai dengan lunas, selama Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya, maka kendaraan akan tetap dipakai oleh Tergugat sendiri, sedangkan dokumen kepemilikan kendaraan termasuk BPKB dikuasai oleh Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya. Namun, sejak tanggal 07 Desember 2021 Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Akad Murabahah, dimana Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini, meskipun sudah memberikan 3 (tiga) kali diberikan Surat Peringatan/Somasi. Akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita kerugian Rp.24.726.055,- (Dua Puluh Empat Juta Tujuh

Ratus Dua Puluh enam Ribu Lima Puluh Lima Rupiah). Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui semua yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat dan Tergugat juga tidak keberatan kendaraan tersebut disita maupun diambil oleh Tergugat, hanya saja saat ini kendaraan tersebut telah disita oleh Polres Solok karena anak Tergugat mengalami kecelakaan lalu lintas dan menyanggol orang dan sudah diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan, namun sampai saat ini belum selesai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1 s/d P.6 dan seorang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3, yang mana menurut Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil, yaitu: dibuat oleh pejabat yang berwenang (*in casu* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, meskipun Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya (*vide* ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUHPerduta), namun karena bukti P.1, P.2 dan P.3 digunakan untuk mengajukan pembiayaan (*vide* Bukti P.4) dan diperkuat juga dengan keterangan saksi Ropi bin Muslir yang menerangkan bahwa saksi mengantarkan surat peringatan (somasi) ke alamat Tergugat sebagaimana tertera pada bukti P.1, P.2 dan P.3 dan ditambah juga dengan pengakuan Tergugat tentang keberadaan bukti P.1, P.2 dan P.3, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu: isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, P.1, P.2 dan P.3 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

2. Bukti bertanda P.4, dan P.5, yang mana menurut Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil, yaitu: dibuat secara partai oleh Penggugat dan Tergugat dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (*incasu* Polda), memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegellen serta dapat diperlihatkan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu: isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, selain itu Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk melumpuhkan bukti P.4 dan P.5 tersebut, maka kekuatan pembuktian P.4 dan P.5 tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;
3. Bukti bertanda P.6, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan surat;

Bukti Saksi:

Perihal perihal kedudukan bukti keterangan seorang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal seorang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Tergugat telah mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, namun untuk tegaknya *asas audi et alteram partem*, Hakim tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat buktinya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 dan keterangan saksi, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perjanjian/ Akad Murabahah dalam pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type BEAT SPORTY CBS, No. Polisi BA 5978 KL, BPKB atas nama Riko, dan Christel Lasmana (Penggugat) selaku Direktur PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Jakarta telah memberikan kuasa khusus tanggal 07 Maret 2022 kepada Suhan Jagara dan Adek Gupal Putra, Keduanya Karyawan PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas, sebagai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kedua Karyawan Perseroan tersebut mempunyai *legal standing* untuk melakukan perbuatan hukum mewakili korporasi di pengadilan. Oleh karena itu, Penggugat merupakan pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cedera janji (wanprestasi) terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa proses penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah melalui prosedur gugatan sederhana telah diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 4 jo. Pasal 5 PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo. Pasal 3 jo. Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim berpendapat setelah mencermati materi gugatan Penggugat tersebut menemukan fakta bahwa baik subjek, objek, prinsip perjanjian maupun petitum perkara yang bersangkutan telah memenuhi syarat formil dan materiil ketentuan dimaksud sehingga Hakim menyatakan gugatan Penggugat *a quo* dikualifisir sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatan perkara *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut;

- 1. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,** Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) *a quo*, Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan seluruhnya/sebagian, ditolak seluruhnya/sebagian, tidak dapat diterima seluruhnya/sebagian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat;

- 2. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat,** Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan tentang apakah Tergugat melakukan cidera janji (wanprestasi) atau tidak, Hakim memandang perlu mengemukakan definisi perikatan/akad, menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) *jo.* Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa *“akad atau perjanjian didefinisikan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu yang menimbulkan hukum berupa hak dan kewajiban”*;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Pasal 22 *jis.* Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *jo.* Pasal 1320 KUHPerdara, unsur-unsur syahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. sepakat mengikatkan dirinya,
- b. cakap untuk membuat perikatan,
- c. suatu hal tertentu, dan
- d. suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa jika ketentuan dan syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 *jis.* Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *jo.* Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut diatas, dihubungkan dengan surat perjanjian/akad murabahah Nomor 542021040014M, dibuat pada tanggal 13 April 2021 (Bukti P.4).

Kedua pihak yaitu: Penggugat/PT. Mandala Multifinance, Tbk. yang diwakili oleh Suhan Jagara, selaku Pimpinan Cabang PT.Mandala Multifinance, Tbk, sebagai pemberi fasilitas pembiayaan, dan Tergugat sebagai penerima fasilitas pembiayaan dan sdr. Ezi Eka Putri (Isteri Tergugat) selaku penjamin/pemberi persetujuan, telah dibuat suatu perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah yang telah ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersedia mengembalikan pembiayaan sebesar Rp.16.110.000,- (Enam Belas Juta Seratus Sepuluh ribu Rupiah) dan margin keuntungan Penggugat sejumlah Rp.9.111.140,- (sembilan juta seratus sebelas ribu seratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim bahwa perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah Nomor 542021040014M, dibuat pada tanggal 13 April 2021 sebagaimana bukti P.4 antara Penggugat dengan Tergugat adalah kesepakatan sebagai perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1338 KUHPerduta. Oleh karena itu, akad *a quo* adalah sah menurut hukum dan mengikat kepada Penggugat dan Tergugat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*);

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya, apakah Tergugat melakukan cidera janji (wanprestasi)? Untuk itu, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pihak dapat dianggap melakukan cidera janji (wanprestasi), apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditentukan bahwa Pihak dalam akad melakukan ingkar

janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam Akad Murabahah tersebut Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp.16.110.000,- (Enam Belas Juta Seratus Sepuluh ribu Rupiah) dan margin keuntungan sebesar Rp. 9.111.140,- (sembilan juta seratus sebelas ribu seratus empat puluh rupiah), dengan cara diangsur selama 35 (tiga puluh lima) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp.749.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 07 (Tujuh) setiap bulannya sampai dengan lunas, selama Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya, maka kendaraan akan tetap dipakai oleh Tergugat sendiri, sedangkan dokumen kepemilikan kendaraan termasuk BPKB dikuasai oleh Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya. Namun, sejak tanggal 07 Desember 2021 Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Akad Murabahah, dimana Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *jo.* 1238 KUHPerdara dalam kasus cidera janji (*wanprestasi*) harus didahului dengan somasi atau teguran atau peringatan agar kreditur memenuhi prestasi yang diperjanjikan, dihubungkan dengan bukti P.6 bahwa sejak 07 Desember 2021 Tergugat tidak melakukan pembayaran sama sekali dan Penggugat telah melakukan peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat agar memenuhi prestasinya dan faktanya Tergugat tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad. Dengan demikian, Hakim menilai Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) kepada pihak Penggugat;

3. **Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM811MK448880, No. Mesin JM81E1453157, No. Polisi BA 4130 KL, BPKB atas nama Riko, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Penggugat, mengenai permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, Hakim telah mempertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.SJJ. tanggal 20 April 2022 *Miladiyah* bertepatan tanggal 19 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, yang amarnya pada pokoknya menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala keadaan mengenai pertimbangan hukum serta amar putusan sela tersebut diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini. Dengan demikian, petitum ketiga Penggugat *a quo* harus dinyatakan ditolak;

4. **Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp.24.726.055,- (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh enam Ribu Lima Puluh Lima Rupiah), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa terkait jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah bukan sejumlah Rp.24.726.055,- (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh enam Ribu Lima Puluh Lima Rupiah), namun angsuran pokok sejumlah Rp.14.787.068,- (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah) ditambah margin keuntungan sejumlah Rp.6.184.932,- (enam juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga jumlahnya Rp.20.972.000,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain pembayaran utang di atas, sesuai Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Tergugat selaku pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi;

- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan risiko;
- d. Denda; dan/atau;
- e. Membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 denda yang harus dibayar oleh Penggugat adalah sejumlah Rp.805.175,- (delapan ratus lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti bahwa Tergugat sejak tanggal 07 Desember 2021 terlambat dan atau tidak membayar kewajibannya sesuai kesepakatan dalam akad, setelah dihitung Tergugat memiliki kewajiban membayar denda sejumlah Rp.805.175,- (delapan ratus lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah). Oleh karena itu, Tergugat dihukum untuk membayar kewajiban denda tersebut yang peruntukkan sebagai dana sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kewajiban Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat sejumlah Rp.21.777.175,- (dua puluh satu juta rupiah tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Angsuran Pokok : Rp.14.787.068,-
- b. Margin Keuntungan : Rp. 6.184.932,-
- c. Denda : Rp. 805.175,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena nominal yang dituntut oleh Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan, maka Hakim menilai petitum *a quo* hanya dikabulkan sebagian;

5. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Type BEAT SPORTY CBS,

No. Rangka MH1JM811MK448880, No. Mesin JM81E1453157, No. Polisi BA 4130 KL, BPKB atas nama Riko, apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 207 R.Bg ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan, *vide* Pasal 218 R.Bg apabila diperlukan Pengadilan dapat meminta bantuan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya (*wanprestasi*) terhadap pihak Penggugat, dan sesuai dengan akad jual beli murabahah objeknya adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM811MK448880, No. Mesin JM81E1453157, No. Polisi BA 4130 KL, BPKB atas nama Riko, yang dijadikan jaminan, dan dihubungkan dengan bukti P.4 dan P.5, maka untuk memenuhi rasa keadilan maka Tergugat dihukum untuk mematuhi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap dengan menyerahkan objek tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum *a quo* dapat dikabulkan;

- 6. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM811MK448880, No. Mesin JM81E1453157, No. Polisi BA 4130 KL, BPKB atas nama Riko, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat perjanjian fidusia, namun disebutkan dalam Pasal 6 Akad bahwa *“Pihak Kedua (Tergugat) berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar kembali kepada Pihak Pertama (Penggugat) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan guna menjamin pembayaran lebih lanjut maka Pihak Kedua (Tergugat) dengan ini memberi kuasa penuh kepada Pihak Pertama (Penggugat) untuk melakukan penarikan atas kendaraan sesuai dengan spesifikasi tersebut diatas dan/atau melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai akad ini”*, meskipun demikian klausul tersebut tidak dapat diberlakukan secara serta merta oleh Tergugat, karena tindakan tersebut adalah tindakan kesewenang-wenangan, mengingat belum adanya kepastian apakah Tergugat telah benar-benar telah melakukan cidera janji (wanprestasi) dan tidak adanya kepastian mulai kapan objek jaminan tersebut dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa dalam sengketa yang sudah terdapat perjanjian fidusia saja tidak dapat serta merta melakukan eksekusi sendiri objek jaminan, kecuali pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya *“cidera janji”* (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (*parate eksekusi*), sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tanggal 6 Januari 2020, *“Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri*

melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri (baca: pengadilan agama). Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada petitum angka 5 (lima) di atas, ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan, *vide* Pasal 218 R.Bg apabila diperlukan Pengadilan dapat meminta bantuan pihak kepolisian, tatkala Tergugat tidak mau menyerahkan objek jaminan tersebut secara sukarela. Oleh karena itu, petitum *a quo* harus ditolak;

- 7. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM811MK448880, No. Mesin JM81E1453157, No. Polisi BA 4130 KL, BPKB atas nama Riko, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada petitum angka 6 (enam) di atas, bahwa dalam sengketa yang sudah terdapat perjanjian fidusia saja tidak dapat serta merta melakukan eksekusi sendiri objek jaminan, kecuali pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (*parate eksekusi*), sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tanggal 6 Januari 2020, “*prosedur atau tata-cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal*

208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri (baca: pengadilan agama). Ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 R.Bg selengkapnya adalah: "Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri (baca: pengadilan agama) yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari";

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini objek jaminan berada pada Tergugat, maka Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek tersebut kepada Penggugat untuk dijual sendiri atau dilelang dimuka umum melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya guna melunasi seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

- 8. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 660 huruf a Rv. menyebutkan bahwa (1) tuntutan tentang uang paksa (*dwangsom*) harus diajukan bersama-sama dalam bentuk satu kesatuan dengan gugatan pokok, (2) tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus didasarkan kepada posita yang jelas, (3) besarnya uang paksa (*dwangsom*) tidak berkenaan dengan gugatan pembayaran sejumlah uang, (4) tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus dicantumkan secara jelas dan tegas dalam petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dihubungkan dengan petitum angka 8 (delapan) surat gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan

Penggugat tidak didukung oleh posita yang jelas, yakni yang memuat alasan-alasan hukum diajukannya tuntutan uang paksa (*dwangsom*) baik berupa hal yang telah diperjanjikan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat, atau juga dengan alasan adanya kekhawatiran Penggugat kepada Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan hukuman pokok sebagaimana yang ditetapkan Hakim secara sukarela. Demikian pula pada petitum angka 8 (delapan) tuntutan *dwangsom* diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan gugatan pembayaran sejumlah uang *in casu* pembayaran angsuran pokok, margin dan denda, padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 jo Pasal 611 Rv uang paksa (*dwangsom*) tidak bisa dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa penghukuman dengan instrument hukum uang paksa (*dwangsom*) adalah dimaksudkan hanya untuk dan terhadap putusan Pengadilan yang menghukum para pihak untuk melakukan dan atau tidak melakukan suatu perbuatan, *dwangsom* tidak dapat dikenakan untuk dan terhadap pembayaran sejumlah uang dan atau tuntutan kebendaan lainnya, hal ini karena untuk hal itu dapat dilakukan upaya hukum lainnya baik dengan cara eksekusi riil, penyitaan atau pelelangan. Dengan demikian, Hakim berpendapat uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diberlakukan untuk dan terhadap perkara *a quo*. Oleh karena itu, petitum *a quo* harus dinyatakan ditolak;

- 9. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 (1) RBg dan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1975 *jis*. SEMA Nomor 3 Tahun 1978, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001, yaitu: menentukan adanya alas hak atas akta otentik, didasarkan

putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi;

Menimbang, bahwa selain itu, petitum angka 9 (sembilan) surat gugatan Penggugat ini juga tidak didukung oleh posita yang jelas, yakni yang memuat alasan-alasan hukum diajukannya putusan serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*). Oleh karena itu, petitum *a quo* harus dinyatakan ditolak;

10. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa norma hukum pembebanan biaya perkara dalam bidang perkara perdata, bahwa barang siapa yang dikalahkan dalam suatu perkara maka dihukum untuk membayar biaya perkara, untuk itu karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 192 ayat (1) R.Bg Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan. Oleh karena itu, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

Menimbang, bahwa karena semua petitum primer telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian Penggugat sejumlah Rp.21.777.175,- (dua puluh satu juta rupiah tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1. Angsuran Pokok sejumlah Rp.14.787.068,- (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah);
 - 4.2. Margin keuntungan sejumlah Rp.6.184.932,- (enam juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)
 - 4.3. Denda sejumlah Rp.805.175,- (delapan ratus lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek jaminan, yaitu: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM811MK448880, No. Mesin JM81E1453157, No. Polisi BA 4130 KL, BPKB atas nama Riko kepada Penggugat untuk dijual oleh Penggugat guna membayar kerugian Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sijunjung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Muhamad Imran, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

TTD.

TTD.

Muhamad Imran, S.H.

Nurhadi, S.H.I., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
d. PBT isi Putusan	Rp.	,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	220.000,-
4. PBT isi Putusan	Rp.	,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	390.000,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)